

SKRIPSI

**KONTRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PONTAP
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KOTA PALOPO**

Disusun dan diajukan oleh

NUR FAIZ SAIYATI

L041 18 1003



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**KONTRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PONTAP
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN
DI KOTA PALOPO**

Disusun dan diajukan oleh

NUR FAIZ SAIYATI

L041 18 1003



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kota Palopo

Disusun dan diajukan oleh

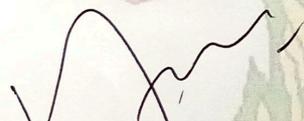
NUR FAIZ SAIYATI

L041181003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 1 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

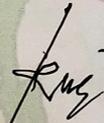
Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Abdul Wahid, S.Pi, M.Si
NIP. 197101262001121001

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Ir. Aris Baso, M.Si
NIP. 196204251990031003

Mengetahui
Ketua Program Studi
Agrobisnis Perikanan



Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19720926 200604 2 001

Scanned by TapScanner

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Faiz Saiyati

NIM : L041 18 1003

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

"Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kota Palopo"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Maret 2023



Nur Faiz Saiyati

NIM. L041 18 1003

ABSTRAK

NUR FAIZ SAIYATI L041181003. “Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kota Palopo” dibimbing oleh **Dr. Abdul Wahid, S.Pi, M.Si** sebagai pembimbing utama dan **Prof. Dr. Ir. Aris Baso, M.Si.** sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap di Kota Palopo kemudian seberapa besar Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo dan berapa besar Pendapatan Masyarakat Nelayan sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Kota Palopo. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juni-Agustus 2022 di Kota Palopo. Penentuan responden menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 41 responden. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Analisis pendapatan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Sistem pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap dikelola sepenuhnya oleh Unit Pengelola TPI. Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 0,311, 0,02, 0,002 dan 0,003 dan pendapatan masyarakat nelayan setiap bulannya yaitu sebesar Rp 29.454.875 dengan sistem bagi hasil nelayan Tempat Pelelangan Ikan Pontap dimana juragan 3 bagian, Operator 1,5 bagian dan Abk adalah 1 bagian.

Kata kunci : Tempat Pelelangan Ikan, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Masyarakat Nelayan

ABSTRACT

NUR FAIZ SAIYATI L041181003. "The Contribution of the Pontap Fish Auction Place (TPI) to Local Own Revenue (PAD) and Fisherman Community Income in Palopo City" guided by **Dr. Abdul Wahid, S.Pi, M.Si** as the main supervisor and **Prof. Dr. Ir. Aris Baso, M.Sc.** as member advisor.

This study aims to find out the Management System of the Pontap Fish Auction Place (TPI) in Palopo City, then how much the Pontap Fish Auction Place (TPI) Contribution is to the Local Revenue (PAD) of Palopo City and how much is the Income of the Fisherman Community around the Fish Auction Place (TPI) Pontap City of Palopo. The research was carried out in June-August 2022 in Palopo City. Determination of respondents using Purposive Sampling technique with a total sample of 41 respondents. Sources of data used are primary data and secondary data and then analyzed using the analysis of Local Own Revenue Contribution and income analysis. From the results of the study it was found that the Pontap Fish Auction Place (TPI) management system is fully managed by the TPI Management Unit. The contribution of the Pontap Fish Auction Place (TPI) in 2018, 2019, 2020 and 2021 amounted to 0.311, 0.02, 0.002 and 0.003 respectively and the income of the fishermen community each month is IDR 29.454.875 with the fishing system profit sharing for fishermen at the Pontap Fish Auction Place where skippers are 3 parts, Operators are 1.5 parts and Abk are 1 part.

Keywords: Fish Auction Place, Regional Own Revenue, Fisherman Community Income

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kota Palopo yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT.

Melalui kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan khusus kepada penyemangat, pembimbing dan penyempurna segala perilaku semasa hidup saya, kedua orang tua tercinta mama **Maisa** dan papa **Ambo Tola**. terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat sabar dalam menghadapi semua keluh kesah penulis, serta telah memberikan dukungan, kasih sayang serta doa yang tulus hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta saudaraku yang saya banggakan **Nur Hidayah**, **Dzulkifli** dan **Nur Maya**, terima kasih telah menjadi saudara yang sangat sabar dalam menghadapi semua keluh kesah penulis, serta telah memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis, penulis tidak mampu melangkah sejauh ini tanpa bimbingan kedua orang tua, saudarah serta keluarga tercinta. semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada keluarga kita. Amiin.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya hantarkan kepada Bapak **Dr. Abdul Wahid, S.Pi., M.Si** selaku penasehat akademik, pembimbing ketua dan juga telah menjadi pengganti orang tua dalam memberikan nasihat, arahan, dukungan, dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Juga kepada pembimbing anggota Bapak **Prof. Dr. Ir. Aris Baso, M.Si** yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan

petunjuk yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Safruddin, S.Pi, M.Si., Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Dr. Ir. Siti Aslamyah, MP** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Ahmad Faizal, ST., M.Si** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si** selaku Ketua Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Ibu Dr. Sitti Fakhriyah, S.Pi, M.Si** selaku Ketua Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
6. **Ibu Prof. Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.Si, & Bapak Dr. Hamzah, S.Pi. M.Si** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran dan kritik yang sangat membangun.
7. **Dosen dan Staf Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
8. **Seluruh Staf Administrasi FIKP** yang selalu membantu dalam urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
9. **Kepala & seluruh staf TPI Pontap** yang membantu dalam urusan pengambilan data penelitian di lokasi Tempat Pelelangan ikan Pontap Kota Palopo.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.

1. **Apriani Padang, Rezqy Amaliah, Volinda Tolinggi', A. Nurfadilla Rosha, Firyal Nada Salsabila A., Nurul Syawalia, Nur Amaliyah Nasruddin dan Putri Wira Drana** atas bantuan dan dukungan penuh yang di berikan kepada penulis semasa berkuliah.
2. **Noviana Kristin, Arsyidah Fachry, Geby Senora, Risma, Febianti Basri dan 12 Ipa satu** yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
3. **Sahabat-sahabat SILO18 (Agrobisnis Perikanan Angkatan 2018)** atas bantuan, semangat, kebersamaan suka cita dan pengalaman yang sangat luar biasa selama penulis menempuh pendidikan.

4. **Muh. Asril** yang tak henti-hentinya mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat, bantuan serta dukungan dalam segala hal.
5. **Anita** yang selalu menyemangati dan mendukung penuh penulis serta selalu memberikan bantuannya.
6. **Teman-Teman HRD EBS FM UNHAS 2022** yang senantiasa mendengar keluh kesah Penulis, terima kasih telah kebersamai sejauh ini.
7. **Teman-Teman Rekaman 2020**, yang telah memberikan dukungan penuh dan semangat kepada Penulis.
8. **Teman-Teman Pengurus EBS FM UNHAS LEGION 2022** yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. **Rahmi Salsabila, Muh. Alfan Asmari dan Nursia** yang telah mendukung penuh penulis dari jauh dan memberikan bantuan terbaiknya.
10. **Taeyeon, SNSD, Key SHINee, Tulus, Nadin Amizah, HIVI, IU, Paul kim, 10cm, Car The Garden, Melomance, Jannabi, Yerim Baek, Younha, EXO dan Baekhyun** yang lagu-lagu indah dan menenangkannya telah menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terutama kepada penulis.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 1 Maret 2023

Nur Faiz Saiyati

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Marobo, Luwu Utara pada tanggal 28 Juli 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Ambo Tola dan Ibu Maisa. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah di SDN 016 Salulimbong Kabupaten Luwu Utara dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Sabbang pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, Selama menempuh pendidikan di SMPN 2 Sabbang penulis juga aktif dan menjadi pengurus dalam kegiatan Pramuka dan menjadi Wakil Ketua Osis ditahun terakhir sekolah. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 5 Luwu Utara pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, selama menempuh pendidikan di SMAN 5 Luwu Utara penulis aktif sebagai pengurus di Pramuka, Menjadi Sekretaris Osis dan Anggota Mading sekolah. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan pada Universitas Hasanuddin Program Studi Agrobisnis Perikanan melalui jalur SNMPTN. Sebagai seorang mahasiswa penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa, yaitu pernah menjabat sebagai Anggota Divisi Logistik pada periode 2021 dan Divisi HRD (Human Resource Development) periode 2022 Pada UKM Radio Kampus EBS FM Unhas. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) regular gelombang 106 tahun 2021 di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kota Makassar. Praktik Kerja Profesi (PKP) di PT. Perikanan Nusantara Cabang Makassar, pada tahun 2021. Penulis juga melaksanakan penelitian di Kota Palopo tepatnya di TPI Pontap Kota Palopo dengan mengangkat judul Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kota Palopo.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Konsep Kontribusi.....	5
B. Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	6
C. Fungsi dan Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	9
D. Masyarakat Nelayan.....	11
E. Pendapatan.....	14
F. Konsep umum Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
G. Penelitian Terdahulu.....	19
H. Kerangka Pikir.....	22
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	24
B. Jenis Penelitian.....	24
C. Populasi dan Sampel.....	24
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Jenis dan Sumber Data.....	25
F. Metode Analisis Data.....	26
1. Analisis Deskriptif Kualitatif.....	26
2. Analisis Kontribusi.....	26
3. Analisis Pendapatan.....	27
G. Konsep Operasional.....	27

IV. HASIL	29
A. Sistem Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	29
B. Keadaan Umum Lokasi	32
C. Karakteristik Responden	33
D. Kontribusi TPI terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37
E. Pendapatan Masyarakat Nelayan	38
V. PEMBAHASAN	41
A. Sistem Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	41
B. Kontribusi TPI terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41
C. Pendapatan Masyarakat Nelayan	45
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	23
---------------	----

DAFTAR TABEL

Table 1	33
Table 2	34
Table 3	34
Table 4	35
Table 5	36
Table 6	38
Table 7	38
Table 8	38
Table 9	39
Table 10	39
Table 11	40
Table 12	40
Table 13	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	53
Lampiran 2.....	56
Lampiran 3.....	58
Lampiran 4.....	60
Lampiran 5.....	62
Lampiran 6.....	64
Lampiran 7.....	66
Lampiran 8.....	68
Lampiran 9.....	70
Lampiran 10.....	72
Lampiran 11.....	74
Lampiran 12.....	76
Lampiran 13.....	77
Lampiran 14.....	78
Lampiran 15.....	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan perikanan merupakan pusat kegiatan bagi masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan tangkap serta menjadi basis pengembangan kegiatan ekonomi perikanan. Pelabuhan perikanan memegang peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam pengembangan masyarakat nelayan pesisir dan pengelolaan sumberdaya perikanan di laut. Pengertian tentang pelabuhan perikanan sebagai pusat pelayanan umum, sebenarnya banyak macam rumusannya. Sebagai suatu lingkungan kerja, pelabuhan perikanan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan. Fungsi tersebut meliputi berbagai macam aspek yakni sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil tangkapan, serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi maupun aspek pemasaran (Suherman, 2012).

Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan (Wiyono, 2005). Menurut sejarahnya Pelelelangan Ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya (Susilowati Indah, 2005).

Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) memegang peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan dan perlu dikelola sebaik-baiknya agar tercapai manfaat yang optimal. Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) juga merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan, tujuan didirikannya Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) adalah untuk membantu memasarkan hasil tangkapan ikan secara cepat untuk menjaga kualitas ikan. Selain membantu nelayan memasarkan hasil tangkapannya tempat pelelelangan ikan juga didirikan untuk menjadi sarana pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah setempat.

Masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai menggantungkan hidup mereka di laut dan menggantungkan hasil pendapatannya dari pekerjaan menangkap ikan serta menjualnya ke pengepul, adapun masalah yang biasanya terjadi pada

masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kemiskinan nelayan atau masyarakat pesisir, diantaranya; tidak adanya perhatian pemerintah yang memihak pada masyarakat nelayan, banyak program terkait masyarakat nelayan masih bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek, bukan subjek. Kondisi alam sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, karena terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut oleh karena musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman teknologi menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan sehingga wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Selain masalah produksi, maka masalah pemasaran juga dihadapi dari nelayan. Untuk membantu memasarkan hasil tangkapan nelayan maka dibangunlah tempat pelelangan ikan (TPI). Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan (wiyono, 2004).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi yang pelaksanaannya diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut Penyederhanaan prosedur administrasi yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. Peningkatan dan Pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan dari prosedur pungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengerahkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah (Oktavina, 2012).

Posisi kota palopo yang terletak dikawasan teluk bone dengan panjang garis pantai ± 21 km dan luas laut $\pm 156,4$ km². Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdiri dari sektor penangkapan ikan di laut, pembudidayaan ikan di lahan tambak maupun kolam. Pengelolaan penangkapan ikan di teluk bone memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil produksi perikanan tangkap. Perairan laut kota palopo

mencakup 5 kecamatan yang berpantai yaitu wara selatan, wara timur, wara utara, bara dan tellu wanua. Hasil tangkapan nelayan di palopo dapat dikatakan relatif tinggi dilihat dari data tahunan dinas perikanan palopo yang dirangkum dalam buku palopo dalam angka pada tahun 2014 jumlah hasil tangkapan dari nelayan berjumlah 10.821,50 ton, pada tahun 2015 hasil nelayan tangkap berjumlah 12.685,60 ton, pada tahun 2016 jumlah hasil tangkapan nelayan sebesar 14.861,60 ton, pada tahun 2017 hasil tangkapan nelayan sebesar 16.951,90 ton, dan pada tahun 2018 hasil tangkapan nelayan sebesar 18.387,50 ton. Dilihat bahwa dari tahun ketahun hasil tangkapan nelayan semakin meningkat (Badan pusat statistik kota palopo, 2019).

Pengelolaan aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Merupakan salah satu aktivitas disuatu Pelabuhan perikanan yang termasuk kedalam aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan (Hendrik, 2020),

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap sendiri menjadi tempat para nelayan dalam meningkatkan kesejahteraannya dalam kondisi Perekonomian masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap yang baik diharapkan mampu menghidupi masyarakat nelayan dari hasil perikanan yang menguntungkan nelayan serta berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah kota Palopo, namun kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kota Palopo"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap di Kota Palopo?
2. Seberapa besar Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo?
3. Seberapa besar Pendapatan Masyarakat Nelayan sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Kota Palopo?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui berapa besar Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui berapa besar Pendapatan Masyarakat Nelayan sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pontap Kota Palopo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberi gambaran tentang TPI Pontap dalam Kontribusinya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.
2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan referensi serta acuan pembandingan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam

berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Ahira, 2013).

B. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan (Wiyono, 2005). Menurut sejarahnya Pelelangan Ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya. Pada dasarnya sistem dari Pelelangan Ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Sampai dengan diberlakukannya otonomi daerah, nelayan masih merupakan komunitas masyarakat miskin dan lemah keadaan ekonominya.

Tujuan Tempat Pelelangan Ikan yang semula didirikan semata-mata hanya untuk kepentingan nelayan dan koperasi perikanan dengan tujuan untuk melepaskan dari kemiskinan, menjadi semakin berkembang menjadi sarana untuk memungut retribusi oleh Pemda Tingkat I, Tingkat II, dan sebagainya. Adapun besarnya retribusi ini bervariasi antara 5%-13%. Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 1971 menginstruksikan kepada semua Gubernur/Kepala Daerah mengenai jumlah pungutan pelelangan yang tidak boleh melampaui 5%. Akan tetapi pada prakteknya tidaklah demikian, karena pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan masih berbeda-beda, ada yang dikelola oleh Koperasi Perikanan/KUD Mina, Dinas Perikanan, maupun dinas Pendapatan Daerah (Nurlinda & Saharruddin, 2013).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan fasilitas dari suatu pelabuhan perikanan/PPI yang pembangunan dan pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh Koperasi. Volume dan nilai produksi yang dilelang di suatu TPI akan mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh :

a. Jumlah dan kualitas karyawan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jumlah dan kualitas karyawan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan proses dan pelayanan lelang agar dapat berjalan lancar, sehingga ikan sampai di konsumen masih dalam kualitas yang baik. Oleh karenanya faktor yang menentukan

banyaknya karyawan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah volume produksi ikan yang dilelang.

b. Jumlah dan kapasitas bakul. Banyaknya bakul akan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis komoditas ikan yang dilelang di suatu Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Apabila jenis ikan yang dilelang adalah komoditas ekspor dan dalam jumlah yang besar, maka bakul yang terlibat lelang adalah bakul dengan modal besar. Sebaliknya jika komoditas ikan yang dilelang konsumsi lokal dan jumlahnya sedikit, maka bakul yang terlibat akan terbatas dan modal kecil. Jumlah dan kapasitas bakul tersebut diharapkan akan mampu membentuk harga ikan yang optimal.

c. Kelengkapan fasilitas penanganan hasil tangkapan selama proses lelang, seperti handling space, ketersediaan air bersih, fasilitas pendingin dan sebagainya. Kelengkapan fasilitas dari suatu TPI akan mampu mempertahankan mutu ikan, sehingga harga ikan akan dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini akan merangsang nelayan untuk melelangkan hasil tangkapannya di TPI tersebut.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat pembongkaran hasil tangkapan yang diperoleh untuk selanjutnya mengalami proses sortasi, pencucian, penimbangan, penjualan dan pengepakan. Setelah itu produk akan didistribusikan, sebagian untuk konsumsi lokal dalam bentuk ikan segar, sebagian untuk processing, ekspor maupun disalurkan ke tempat pembekuan untuk selanjutnya diawetkan. Berkaitan dengan fungsi TPI, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Perda Nomor I/ tahun 1984 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Tengah. Pada Perda tersebut antara lain disebutkan bahwa :

a. Yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan ikan, disingkat TPI

b. Penanggung jawab pelelangan ikan di TPI adalah Dinas Perikanan

c. Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada organisasi nelayan dalam bentuk koperasi

1.. Maksud, tujuan dan manfaat TPI adalah sebagai berikut :

a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang

b. Mengusahakan stabilitas harga ikan

c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya

d. Meningkatkan pendapatan asli daerah (Widayati, 2008).

2. Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat pelelangan ikan memegang peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan dan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar tercapai manfaat secara optimal. Tempat pelelangan ikan merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan

usaha dan kesejahteraan nelayan, tujuan didirikannya tempat pelelangan ikan adalah untuk membantu memasarkan hasil tangkapan ikan secara cepat untuk menjaga kualitas ikan, serta melindungi nelayan dari permainan harga dari tengkulak, membantu nelayan mendapatkan harga ikan yang layak. Selain membantu nelayan memasarkan hasil tangkapannya tempat pelelangan ikan didirikan juga untuk menjadi sarana pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah setempat.

Pengelolaan perikanan diatur oleh Undang-undang, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pengelolaan perikanan didasarkan atas asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Manajemen pengelolaan yang baik menjadi penting untuk di implementasikan, hal ini karena manajemen pengelolaan yang baik di perlukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga potensi kelautan yang dimiliki dapat terkelola dengan baik dan bermanfaat untuk semua. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, sedangkan mengelola pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan tertentu. Dalam konsep manajemen ada enam unsur manajemen yang biasa digunakan untuk menentukan arah kebijakan organisasi yaitu;

1. Men, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif;
2. Money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan;
3. Method, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha untuk menapai tujuan;
4. Materials, bahan-bahan yang diperuntukan untuk mencapai tujuan;
5. Machines, mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan guna mencapai tujuan;
6. Market, pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan (Hasibuan, 2008)

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah suatu seni untuk mengatur atau mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud merupakan pemerintah sebagai

penanggung jawab dalam mengelola potensi kelautan. Pemerintah bertanggung jawab juga memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan serta pengembangan SDM dengan adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan, juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat pemasaran ikan. Seperti tertera pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan lainnya.

C. Fungsi dan Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan adalah disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan / pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat) (Sajid, 2015). Fungsi TPI antara lain adalah : Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang, Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan, Mempermudah pengumpulan data statistik. Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang disepakati bersama, Keberadaan tempat pelelangan ikan atau (TPI) yang berada di dalam pelabuhan pendaratan ikan (PPI) membuat Hasil tangkapan ikan yang di tangkap oleh nelayan didaratkan dipelabuhan pendaratan ikan (PPI) selanjutnya ikan segar dibawa ke pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan di letakkan di gedung tempat pelelangan ikan (TPI) ikan segar hasil tangkapan nelayan di lelang atau dijual ke penampung hasil tangkapan ke pengusaha penjual ikan lainnya. Pengelolaan aktivitas di tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu aktivitas di suatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang disepakati bersama (Hendrik, 2020).

Pelabuhan perikanan berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumberdaya ikan. Tempat Pelelangan Ikan merupakan suatu wadah tempat berlangsungnya penjualan hasil-hasil penangkapan ikan dari laut/perairan lain yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan harga beratas-atasan. Pelabuhan Perikanan, termasuk didalamnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), adalah pusat ekonomi perikanan yang diarahkan untuk menjadi kawasan andalan yang strategis, produktif, dan cepat tumbuh sebagai sentra produksi dan sentra industri bagi pengembangan ekonomi terpadu di wilayah pesisir. Dilihat dari fungsinya, Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan prasarana penangkapan yang diperuntukkan bagi semua pengguna jasa/stakeholders yang bekerja di sektor perikanan, terutama untuk nelayan skala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perikanan, pengembangan wilayah dalam memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan serta mendukung pelaksanaan program otonomi daerah. Dengan demikian, keberadaan PPI mutlak diperlukan untuk menunjang aktivitas perikanan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, pembangunan PPI perlu dilakukan. Pangkalan Pendaratan Ikan seringkali menjadi barometer majunya perikanan di suatu daerah atau wilayah karena kita dengan cepat melihat perkembangan unsur-unsur yang berperan dalam usaha perikanan seperti ikan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, nelayan, pengusaha perikanan dan pasar ikan. Salah satu fasilitas fungsional yang harus ada dalam suatu PPI adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Keberadaan fasilitas TPI berfungsi agar nilai hasil tangkapan tetap tinggi serta mutu hasil tangkapan dapat tetap terjaga. Pelelangan adalah kegiatan pemasaran yang mempertemukan penjual dan pembeli (Isdahartatie, 2016).

Fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk membantu aktivitas nelayan yang ingin menjual ikan secara cepat dan dengan harga yang baik dan untuk menampung hasil tangkapan ikan nelayan. Selain itu, Tempat Pelelangan Ikan juga dapat membantu nelayan untuk belajar menabung untuk menghadapi resiko ketika penghasilan atau pendapatan dari menangkap ikan (Nurlinda & Saharruddin, 2013).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sampai saat ini berfungsi menciptakan keseimbangan harga komoditas ikan yang dilelang. Hal ini dikarenakan TPI diberikan mandat untuk menjamin harga yang optimal kepada nelayan sehingga dapat mensejahterakan mereka. Berdasarkan hal tersebut, fungsi TPI sangat kuat dalam mensejahterakan pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan. Fungsi Tempat

Pelelangan Ikan juga adalah untuk menyalurkan dan menkoordinir sistem penjualan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pembeli dengan sistem lelang (Isdahartatie, 2016).

D. Masyarakat Nelayan

a. Definisi Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut, Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan kemiskinan nelayan atau masyarakat pesisir, diantaranya; tidak adanya perhatian pemerintah yang memihak pada masyarakat nelayan, banyak program terkait masyarakat nelayan masih bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek, bukan subjek.

Kondisi alam sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, karena terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut oleh karena musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman teknologi menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Kondisi lain yang turut memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak sepantasnya jika mengatakan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika terjadi masa paceklik, pada akhirnya mereka berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi mereka.

Deskripsi diatas merupakan pusanan masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2008) terdapat lima masalah pokok antara lain :

1. Kondisi Alam

Kompleksnya permasalahan pada masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

2. Tingkat pendidikan nelayan

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumberdaya manusia rendah dan tingkat produktivitas tangkapannya juga sangat rendah.

3. Pola kehidupan nelayan

Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.

4. Pemasaran hasil tangkapan

Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar,

5. Program pemerintah yang belum memihak pada masyarakat nelayan.

Masyarakat nelayan dapat di pandang sebagai suatu lingkungan hidup dari satu individu atau satu keluarga nelayan. Dengan kata lain masyarakat nelayan dibentuk oleh sejumlah rumah tangga nelayan dan tiap rumah tangga merupakan lingkungan hidup bagi yang lainnya (Mantjoro, 1995). Kehidupan masyarakat nelayan adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah.

Direktoral Jendral Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan perikanan (DJPT-DKP) tahun 2007 mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Sementara orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Direktoral Jendral Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan perikanan (DJPT-DKP) (2007) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan, yaitu:

- 1) Nelayan penuh Nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- 2) Nelayan sambilan utama Nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain.
- 3) Nelayan sambilan tambahan Nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.

b. Karakteristik Masyarakat Nelayan

Satria (2002) menguraikan secara singkat karakteristik masyarakat pesisir sebagai representasi komunitas desa-pantai dan desa terisolasi, dari berbagai aspek:

- 1) Sistem Pengetahuan Pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya diperoleh secara turun temurun berdasarkan pengalaman empirik. Kuatnya pengetahuan lokal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup sebagai nelayan. Pengetahuan lokal (indigenous knowledge) tersebut merupakan kekayaan intelektual yang hingga kini terus dipertahankan.
- 2) Sistem Kepercayaan Secara teologi, nelayan masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai tradisi dilangsungkan hanya sebagai salah satu instrumen stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.
- 3) Peran Wanita Umumnya selain banyak bergelut dalam urusan domestik rumah tangga, istri nelayan tetap menjalankan aktivitas ekonomi dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Istri nelayan juga dominan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga sehari-hari sehingga sudah sepatutnya peranan istri-istri nelayan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap program pemberdayaan.
- 4) Struktur Sosial Struktur yang terbentuk dalam hubungan produksi (termasuk pasar) pada usaha perikanan, perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan ini merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Pada perikanan budidaya, patron meminjamkan modal kepada para nelayan lokal untuk pembudidayaan ikan. Dengan konsekuensi, hasilnya harus dijual kepada patron dengan harga yang lebih murah. Ciri yang kedua adalah stratifikasi sosial. Bentuk stratifikasi masyarakat pesisir Indonesia sangat beragam. Seiring modernisasi akan terjadi diferensiasi sosial yang dilihat dari semakin bertambahnya jumlah posisi sosial atau jenis pekerjaan sekaligus terjadi pula perubahan stratifikasi karena sejumlah posisi sosial tersebut tidaklah bersifat horisontal, melainkan vertikal dan berjenjang berdasarkan ukuran ekonomi, prestise atau kekuasaan.
- 5) Posisi Sosial Nelayan Di kebanyakan masyarakat, nelayan memiliki status yang relatif rendah. Rendahnya posisi sosial nelayan ini merupakan akibat dari keterasingan nelayan sehingga masyarakat bukan nelayan tidak mengetahui lebih jauh cara hidup nelayan. Hal ini terjadi akibat sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain karena alokasi waktu yang besar untuk kegiatan penangkapan ikan disbanding untuk bersosialisasi dengan masyarakat bukan nelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai. Secara politis posisi nelayan kecil terus dalam posisi dependen dan marjinal akibat dari faktor kapital yang dimilikinya sangatlah terbatas (Indarti lin dan Kuntari Yeni, 2019).

E. Pendapatan

Menurut Suroto 2000 dalam (Christoper dkk, 2017) teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya: seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (Productive service) yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.

Pendapatan keluarga adalah pendapatan dari suami dan istri serta anggota keluarga lainnya dari kegiatan pokok maupun tambahannya. Pendapatan sebagai ukuran kemakmuran yang telah dicapai oleh seseorang atau keluarga pada beberapa hal merupakan faktor yang cukup dominan untuk mempengaruhi keputusan seseorang atau keluarga terhadap suatu hal. Pendapatan keluarga berperan penting, karena pada hakekatnya kesejahteraan keluarga sangat tergantung pada besar kecilnya pendapatan keluarga (Anggraini 2007). Menurut (Christoper dkk, 2017) Pendapatan keluarga sangat menentukan besarnya alokasi waktu yang digunakan seseorang untuk bekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh suatu keluarga maka semakin rendah alokasi waktu yang digunakan untuk bekerja.

Untuk mengetahui besarnya pendapatan dapat diketahui dengan rumus :
(Suriadi dkk, 2015)

$$TR = Q \times P$$

Dimana :

TR = Total revenue/Total pendapatan (Rp)

Q = Total Quantity / Jumlah Output

P = Price / Harga penjualan (Rp)

Untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dapat diketahui dengan rumus :

$$TC = FC + VC$$

Dimana :

TC = Total cost / Biaya total (Rp)

FC = Fix cost / jumlah biaya tetap (Rp)

VC = Variable cost/jumlah biaya variabel (Rp)

Keuntungan:

Untuk mengetahui besarnya keuntungan yang didapat dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{NP = TR - TC}$$

Dimana :

NP = Net profit / keuntungan bersih (Rp)

TR = Total revenue/ pendapatan total (Rp)

TC = Total cost/ Biaya total (Rp)

Berbicara pada masalah kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat yang lain. Penyebab kemiskinan nelayan adalah perolehan pendapatan yang tidak menentu karena bergantung dari kondisi alam. Kondisi alam merupakan sesuatu yang terkadang tidak dapat diprediksi, cuaca yang bagus akan mendapat hasil yang melimpah, demikian sebaliknya apabila cuaca kurang baik perolehan penangkapan atau proses pembudidayaan terbatas bahkan tidak mendapat hasil. Melihat kondisi pendapatan nelayan terbatas terutama bagi nelayan tradisional (buruh nelayan). Oleh karena itu di butuhkan dukungan anggota keluarga seperti, istri atau anak untuk membantu menambah perekonomian keluarga (Listyawati dan Suryani, 2017).

Pada umumnya para nelayan juga masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan sehingga wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Selain masalah produksi, maka masalah pemasaran juga dihadapi dari nelayan. Untuk membantu memasarkan hasil tangkapan nelayan maka dibangunlah tempat pelelangan ikan (TPI). Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan (wiyono, 2004).

F. Konsep umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dilaksanakan oleh wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dananya bersumber dari APBD, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Di

era otonomi daerah sekarang ini, daerah mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu ciri dari kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengelola keuangannya.

Oleh karena itu daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang besar. Sementara itu sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber-sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sementara itu pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya dan kemudian menentukan sendiri sumber penerimaan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, daerah di berikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dan 28 jenis retribusi. Daerah dilarang memungut jenis

Pajak selain yang tersebut di atas (Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009). Apabila ada Daerah menetapkan Perda dan melakukan pemungutan Pajak Daerah selain yang ditetapkan UU, maka Perda tersebut akan direkomendasikan untuk dapat dibatalkan.

Pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah Tingkat I sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Jenis jenis pajak provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Pajak Kendaraan di Atas Air;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan.

b. Pajak Kabupaten/Kota Pajak kabupaten/kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku kepala daerah Tingkat II sebagai bagian dari pendapatan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pelayanan Pasar;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Retribusi Tempat Pelelangan;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Parkir Khusus;
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Retribusi Penyedotan Kakus;
- Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Retribusi Izin Gangguan; dan
- Retribusi Izin Trayek;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN. BUMD atau lembaga keuangan negara/daerah lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban negara berkenaan dengan investasi tersebut. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari:

- Bagian laba dari perusahaan daerah;
- Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh Bank Daerah);
- Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Selain jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Sunari et., Al, 2019).

G. Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya turut membantu peneliti dalam memahami dan menjadi pedoman peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian serupa yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sanawiya (2013) dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jayapura”. Hasil Penelitian ini didapatkan besarnya perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Jayapura selama periode analisis tahun 2008-

2012 termasuk dalam kriteria analisis kontribusi dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,91%. Artinya realisasi dari penerimaan pajak hotel dan restoran belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak daerah Kabupaten Jayapura. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran menunjukkan bahwa efektifitasnya selalu masuk dalam kategori sangat efektif, dimana rata-rata efektifitas selama 5 (lima) tahun (2008-2012) adalah sebesar 155%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak hotel dan restoran baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indarja et., al. (2012) dengan judul “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekalongan”. Pelabuhan Perikanan Pekalongan dalam perkembangannya dibidang ekonomi, khususnya Pendapatan Asli Daerah memerlukan keseimbangan antara peraturan perundang - undangan, lembaga pemerintah, otonomi daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah Pekalongan sebagai pelaksana otonomi mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran daerah kota Pekalongan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan merupakan sumber yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas Pelabuhan Perikanan dimana hasil dari fasilitas tersebut merupakan pemasukan bagi Perusahaan Umum (Perum) itu sendiri. Lain halnya dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan (DPPK) yang berfungsi membuat kebijakan Peraturan Daerah (Perda) dalam bentuk retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan. Oleh karena itu Pelabuhan Perikanan diharapkan dapat dikelola secara sinergi atau satu lembaga yang membawahnya agar tidak ada pelampauan kewenangan antara PPN Perum Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan sehingga dapat meningkatkan PAD Pekalongan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Pekalongan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrial et., al. (2018) dengan judul “Analisis Komoditas Unggulan Dan Kontribusi Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kabupaten Trenggalek”. Hasil Penelitian ini yaitu Komoditas unggulan berdasarkan volume produksi dan penerimaan adalah ikan Layang Deles, Lemuru, Tuna Madidihang dan Tongkol Como. Ratarata kontribusi komoditas unggulan perikanan tangkap dari tahun 2011-2015 terhadap PAD yaitu ikan Layang Deles ikan Lemuru 0,9%; ikan Tuna Madidihang 0,3% dan ikan Tongkol Como sebesar 0,1%. Hasil analisa komoditas unggulan berdasarkan penerimaan yang meliputi Ikan Layang Deles, Lemuru, Tuna

Madidihang dan Tongkol Como selanjutnya akan dianalisis seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Perda Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 tentang Pelelangan Ikan menyebutkan bahwa besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan (penerimaan).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi Eka Suherman (2020) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”. Hasil Penelitian ini yaitu Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori kurang efektif. Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Enrekang pada tahun 2015-2019 adalah 14,5%, 14,4%, 8,9%, 14,1%, 13,9%. Jadi rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Enrekang hanya mencapai 13,16% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Erwin (2021) dengan judul “Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Tata Kelola Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui hambatan pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai. Semua data yang dikumpulkan, baik dari penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan perlu dianalisa, analisa bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diketengahkan. Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2008) megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hasrianti (2018) dengan judul Dampak Pariwisata Pantai Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dampak pariwisata pantai teluk laikang terhadap pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Takalar, Secara khusus penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem pengelolaan Teluk Laikang sebagai objek wisata bahari di Desa Laikang, Kabupaten Takalar, untuk mengetahui seberapa besar pendapatan masyarakat disekitar objek wisata Teluk Laikang di Desa

Laikang, Kabupaten Takalar dan Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata Teluk Laikang di Desa Laikang, Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2004). Untuk menjawab tujuan penelitian maka peneliti menggunakan analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang antara lain berupa penjelasan lain yang diperlukan dalam penulisan. Kuantitatif adalah jenis penelitian yang berbentuk angka-angka dan meliputi biaya tetap dan biaya variabel, serta keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat lokal yang memanfaatkan adanya obyek wisata Teluk Laikang.

H. Kerangka pikir

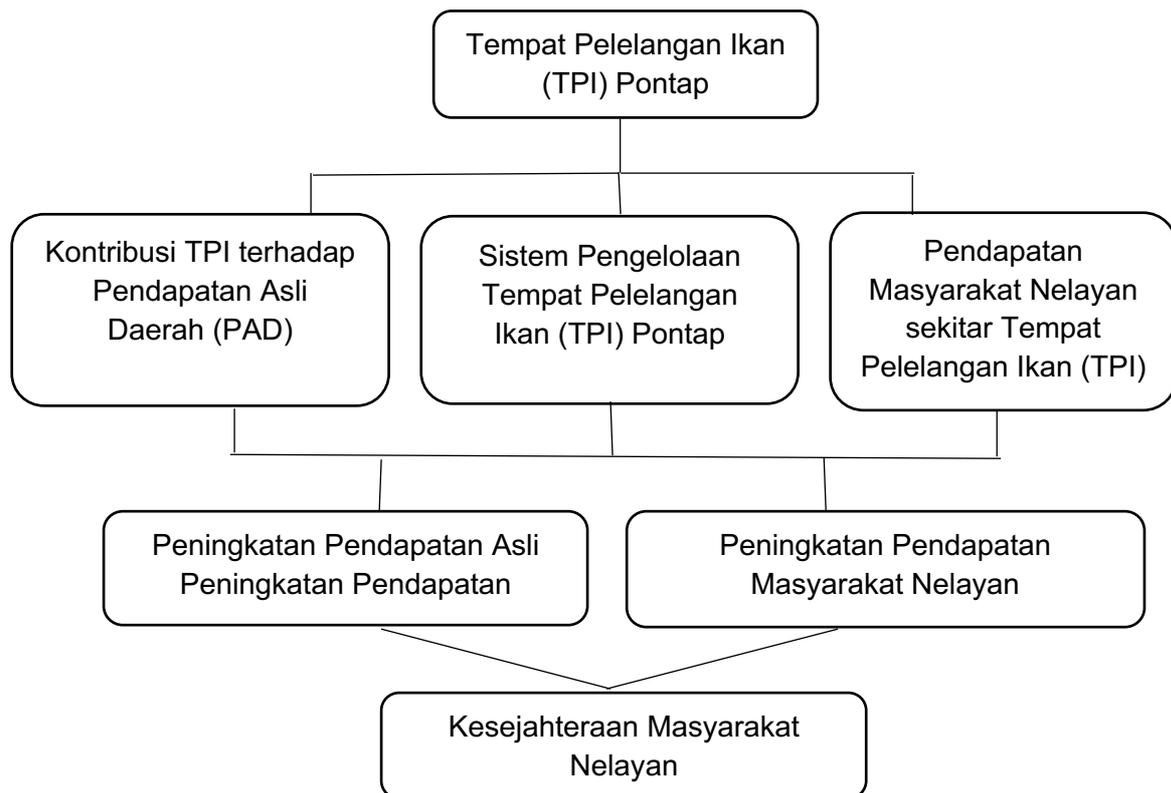
Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Mujiman menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara (Ningrum, 2017).

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.

Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan (Wiyono, 2005).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) Pontap dengan manajemen pengelolaannya memiliki Kontribusi terhadap upaya Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.



Gambar 1. Kerangka Pikir